



# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



## PROGRAM KERJA TAHUN 2023

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo  
Telp : 031- 8665369  
Email : Surabaya@dilmil.org



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Program Kerja Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diselesaikan dengan baik.

Program kerja merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Strategis 2020-2024. Penyusunan program kerja didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program kerja ini dievaluasi secara berkala dan dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan atau aturan-aturan berlaku.

Sidoarjo, 6 Maret 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Profil Organisasi .....	1
C. Visi Dan Misi .....	5
D. Tujuan Dan Sasaran .....	6
<b>BAB II. PROGRAM KERJA</b> .....	7
A. Program Utama Dan Kegiatan Pokok .....	7
B. Penjabaran Program Kerja .....	8
C. Dukungan Anggaran .....	10
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	16



## ***DAFTAR TABEL***

Tabel I.1 Data Pegawai Tahun 2023 .....	2
---	---



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Program kerja merupakan penjabaran dari rencana strategis yang diuraikan ke dalam rencana tindakan. Program kerja disusun dengan mempertimbangkan dukungan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik lingkungan internal maupun external.

Seluruh rencana kegiatan yang disusun dalam program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan prima tersebut adalah pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan biaya ringan.

### **B. PROFIL ORGANISASI**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.



Sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Tahun 2023 SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 43 orang, terdiri dari 33 orang pegawai organik, 9 orang PTT dan 1 (satu) orang pegawai BP (diperbantukan) dari Pengadilan Militer III-16 Makasar.

Tabel I.1 Data Pegawai Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20 – 30 Th	31 – 40 Th	41 – 50 Th	51 – 58 Th
1	Militer	22	20	2	2	11	0	9	3	2	13	5
2	PNS	12	3	9	0	5	3	0	3	2	3	3
3	PTT	9	7	2	0	1	0	8	3	5	1	-
Jumlah		43	31	13	3	16	3	8	9	9	17	8

## 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### A) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit



berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## **B) FUNGSI**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

### **1) Fungsi Administrasi**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.



## 2) Fungsi Pembinaan

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara berkala untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat Majelis Hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemsyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

## 3) Fungsi Pengawasan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya





mengiringinya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

### **C. VISI DAN MISI**

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.



2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **D. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan yaitu :

- A) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- B) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- C) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- D) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

##### **2. SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- A) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- B) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.



- 
- C) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.



## **BAB II**

# **PROGRAM KERJA**

### **A. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya. Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2023 terdapat 2 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen.

#### **1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum**

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara.



Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer.

## **2. Program Dukungan Manajemen**

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya pengelolaan SDM.
- b) Meningkatnya kinerja peradilan
- c) Meningkatnya pelayanan publik.
- d) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana.

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

## **B. PENJABARAN PROGRAM KERJA**

### **1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum**

Penjabaran program kerja penegakan dan pelayanan hukum dijabarkan berdasar sasaran yaitu sebagai berikut :

#### **A) Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel**

Untuk mencapai sasaran terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Sidang di luar gedung pengadilan
- 2) Pemeriksaan barang bukti di luar ruang sidang
- 3) Pembelian alat tulis kantor (ATK)
- 4) Penggandaan dan penjilidan berkas perkara



- 5) Pembelian konsumsi sidang

#### **B) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan administrasi perkara, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pengiriman surat-surat yang berhubungan dengan administrasi perkara
- 2) Pengiriman berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
- 3) Minutasi perkara

### **2. Program Dukungan Manajemen**

#### **A) Meningkatnya Pengelolaan SDM**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan SDM, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 2) Pembayaran honor
- 3) pembayaran uang makan
- 4) Pengusulan diklat/bimtek
- 5) Perjalanan dinas konsultasi/sosialisasi
- 6) Pembelian pakaian dinas
- 7) Sewa rumah dinas Hakim

#### **B) Meningkatnya Kinerja Peradilan**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pelaksanaan operasional sehari-hari perkantoran
- 2) Langganan daya dan jasa
- 3) Pemeliharaan gedung kantor
- 4) Pembelian ATK
- 5) Langganan hosting website



6) Pengiriman surat dinas

### **C) Meningkatnya pelayanan publik**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Penyemprotan Disinfektan
- 2) Pembelian lisensi video conference

## **C. DUKUNGAN ANGGARAN**

Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.063.581.000,- (delapan milyar enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2023 tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 179.850.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

### **1. DIPA DARI BUA MA-RI (DIPA 01)**

Anggaran dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA-RI dalam DIPA 01 digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan non



operasional perkantoran. DIPA 01 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang.

Rencana pelaksanaan belanja untuk anggaran DIPA 01 sebagai berikut :

### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai tahun 2023 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja gaji PNS
- Belanja tunjangan PNS dan TNI
- Belanja uang makan PNS

### **2. Belanja Barang.**

Belanja barang tahun 2023 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran
- Belanja langganan daya dan jasa
- Belanja pemeliharaan gedung dan halaman
- Belanja operasional Hakim
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
- Belanja operasional kantor
- Belanja perjalanan dinas konsultasi
- Belanja pencegahan Covid-19

## **2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN MA-RI (DIPA 05)**

Anggaran dari Ditjen Badilmiltun MA-RI dalam DIPA 05 digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara. DIPA 05 hanya terdiri atas belanja barang.

Rencana pelaksanaan belanja untuk anggaran DIPA 05 yaitu :

- Belanja perjalanan dinas sidang di luar gedung





- Belanja jasa pengiriman surat/berkas perkara
- Belanja kebutuhan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Belanja kebutuhan administrasi penyelesaian perkara

Adapun rencana aksi program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan serta anggaran adalah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah :



## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

### SASARAN STRATEGIS 1

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93 %	93 %	93 %	93 %
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %	74 %	74 %	74 %
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78 %	78 %	78 %	78 %
		d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98	98	98

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Menyusun rencana sidang	√	√	√	√	Jadwal rencana sidang	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	82.030.000
2	Menetapkan susunan majelis hakim	√	√	√	√	- Penetapan Hakim			
3	Menetapkan panitera	√	√	√	√	- Penetapan Panitera			
4	Melaksanakan persidangan secara tepat waktu, transparan, efektif dan efisien	√	√	√	√	- Putusan - Berita Acara Sidang			
5	Menyusun laporan penyelesaian perkara	√	√	√	√	- Laporan perkara bulanan			



						- Laporan perkara tahunan - Laporan perkara upaya hukum			
6	Menetapkan tim survei	√	√	√	√	SK tim survei	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	60.440.000
7	Melaksanakan survei					Data hasil survei			
8	Menyusun laporan survei					Laporan survei			

## SASARAN STRATEGIS 2

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan Ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Melaksanakan minutasasi perkara	√	√	√	√	Perkara telah diminutasasi	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	37.280.000
2	Membuat salinan putusan	√	√	√	√	Salinan putusan			
3	Mengirim salinan putusan yang disampaikan Ke para pihak secara tepat waktu	√	√	√	√	Bukti pengiriman salinan putusan			



### SASARAN STRATEGIS 3

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	85%	85%	85%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Merencanakan perkara-perkara yang akan diselesaikan di luar gedung pengadilan	√	-	√	√	Rencana sidang	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	60.540.000
2	Membentuk susunan majelis hakim dan panitera yang akan melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	√	-	√	√	Sprin majelis hakim dan panitera			
3	Mengajukan permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan					- Surat permohonan pinjam tempat / ruang sidang - Surat ijin pinjam tempat / ruang sidang			
4	Melaksanakan persidangan secara tepat waktu, transparan, efektif dan efisien					Putusan			



## ***BAB V PENUTUP***

Program kerja tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran. Program kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memberi arah bagi pelaksanaan kinerja yang berorientasi hasil. Program dan kegiatan dalam program kerja ini didukung oleh anggaran yang berasal dari APBN TA 2023. Reviu atas program kerja akan dilakukan apabila terdapat kebijakan atau peraturan baru dan juga bila terdapat revisi atas anggaran.